

Peran Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi terhadap Perkembangan Peserta Didik

Syafira Ananda Putri Siregar¹, Khairuddin Tambusai², Muhammad Fharisi³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2},

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura³

Email: rifda117676@gmail.com¹, khairuddin@uinsu.ac.id²,

Muhammad.Fharisi@ijmlangkat.ac.id³

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor penyebab ketimpangan akses pendidikan di Indonesia serta implikasinya terhadap perkembangan peserta didik dan peran layanan bimbingan konseling (BK) di sekolah. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji tujuh jurnal ilmiah serta berbagai sumber relevan terkait ketimpangan sosial ekonomi, geografis, budaya, infrastruktur, dan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan berdampak signifikan terhadap aspek akademik, psikologis, sosial, dan emosional peserta didik, termasuk rendahnya motivasi belajar, learning loss, keterbatasan keterampilan sosial, serta meningkatnya risiko marginalisasi psikologis. Penelitian juga menemukan bahwa layanan BK memiliki peran strategis dalam memberikan intervensi adaptif melalui konseling individual, layanan responsif, bimbingan kelompok, penguatan resiliensi, advokasi siswa rentan, serta edukasi kebijakan bagi orang tua dan sekolah. Selain itu, efektivitas kebijakan pemerintah seperti KIP, ADEM, digitalisasi sekolah, dan program SEBsP sangat dipengaruhi oleh sinergi pusat-daerah dan kualitas monitoring. Studi ini menegaskan perlunya kolaborasi multi-pihak dan penguatan layanan BK untuk mengurangi dampak ketimpangan serta mendukung pemerataan pendidikan yang berkeadilan.

Kata Kunci. *Ketimpangan Pendidikan, Akses Pendidikan, Bimbingan Konseling, Kesenjangan Sosial Ekonomi, Pemerataan Pendidikan*

Abstract. This study aims to comprehensively analyze the factors causing inequality in access to education in Indonesia and its implications for student development and the role of guidance and counseling (BK) services in schools. Using a literature review method with a descriptive qualitative approach, this study reviewed seven scientific journals and various relevant sources related to socioeconomic, geographic, cultural, infrastructure, and gender inequality. The results of the study indicate that educational inequality has a significant impact on the academic, psychological, social, and emotional aspects of students, including low learning motivation, learning loss, limited social skills, and an increased risk of psychological marginalization. The study also found that BK services have a strategic role in providing adaptive interventions through individual counseling, responsive services, group guidance, strengthening resilience, advocacy for vulnerable students, and policy education for parents and schools. Furthermore, the effectiveness of government policies such as KIP, ADEM, school digitalization, and the SEBsP program is strongly influenced by central-regional synergy and the quality of monitoring. This study emphasizes the need for multi-stakeholder collaboration and strengthening BK services to reduce the impact of inequality and support equitable education.

Keywords. *Educational Inequality, Access to Education, Guidance and Counseling, Socioeconomic Disparities, Educational Equity*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi instrumen utama dalam pengembangan potensi individu secara akademik, sosial, emosional, dan moral. Dalam perspektif psikologi pendidikan dan bimbingan konseling, pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga media pembentukan karakter, penguatan fungsi adaptif, serta peningkatan kesejahteraan psikologis peserta didik. Namun, akses terhadap pendidikan yang layak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama terkait ketimpangan sosial ekonomi, geografis, dan teknologi yang berdampak langsung pada perkembangan peserta didik. Kesenjangan akses pendidikan yang terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi dan rendah, tidak hanya memengaruhi capaian akademik, tetapi juga kesejahteraan psikologis dan perkembangan sosial anak.

Data (Badan Pusat Statistik, 2023) menunjukkan disparitas rata-rata lama sekolah antara kota (9,8 tahun) dan desa (7,6 tahun). Ketimpangan ini menimbulkan tantangan tambahan bagi pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah, terutama dalam membantu siswa mengatasi hambatan belajar, masalah adaptasi, dan tekanan psikologis akibat kondisi keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung. Dalam konteks bimbingan konseling, ketimpangan akses pendidikan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai permasalahan seperti rendahnya motivasi belajar, kurangnya dukungan emosional keluarga, kecenderungan putus sekolah, hingga lemahnya keterampilan sosial dan pengambilan keputusan.

Teori Reproduksi Sosial Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial melalui perbedaan modal ekonomi, sosial, dan kultural. Hal ini mengimplikasikan bahwa konselor sekolah perlu memahami sistem sosial yang memengaruhi peserta didik agar dapat memberikan layanan konseling yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan. Penelitian sebelumnya seperti (Chandra et al. 2023) serta (Marleni 2016) memperkuat bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan dukungan psikososial, komunikasi keluarga, pola asuh, dan lingkungan belajar. Dengan demikian, intervensi konseling menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis dan sosial dari ketimpangan tersebut, sekaligus membantu siswa membangun resiliensi, motivasi belajar, dan keterampilan menghadapi hambatan struktural.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mendalam diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan akses pendidikan serta implikasinya terhadap pelayanan bimbingan konseling. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi layanan konseling yang lebih inklusif, pengembangan kurikulum BK yang responsif terhadap keragaman sosial ekonomi siswa, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan berbagai sumber ilmiah secara mendalam guna menjelaskan faktor-faktor penyebab ketimpangan akses pendidikan, dampaknya terhadap peserta didik, serta relevansinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Studi kepustakaan memberi ruang bagi peneliti untuk mengkomparasikan berbagai temuan penelitian, teori pendidikan, dan dokumen kebijakan sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif (Waruwu 2024).

Bahan utama dalam penelitian berasal dari berbagai sumber ilmiah seperti buku akademik di bidang pendidikan, psikologi pendidikan, dan bimbingan konseling; jurnal nasional dan internasional yang membahas pemerataan pendidikan serta ketimpangan sosial ekonomi; dan laporan resmi pemerintah seperti publikasi Badan Pusat Statistik serta dokumen kebijakan dari Kemendikbud. Untuk menelusuri dan mengorganisasi bahan bacaan tersebut, peneliti memanfaatkan alat pencarian literatur digital seperti Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, dan e-resources Perpustakaan. Aplikasi manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley digunakan untuk menyusun sitasi dan mempermudah pengelolaan sumber rujukan (Arianto 2024).

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap sistematis. Pertama, peneliti mengidentifikasi literatur dengan menggunakan kata kunci seperti “ketimpangan pendidikan”, “akses pendidikan”, “bimbingan konseling”, “psikologi pendidikan”, dan “kesetaraan pendidikan”. Kedua, peneliti menyeleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi, yaitu terbit dalam 10 tahun terakhir, relevan dengan isu pemerataan pendidikan dan layanan BK, serta berasal dari sumber akademik yang kredibel. Setelah itu, peneliti melakukan ekstraksi data dengan mencatat teori, temuan penelitian, faktor penyebab ketimpangan, dampak psikososial, dan strategi intervensi konseling yang ditemukan dalam setiap literatur (Sunawan et al. 2017).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis). Proses dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih literatur yang paling relevan dan mampu menjawab fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti mengategorikan informasi ke dalam tema-tema tertentu, seperti penyebab ketimpangan pendidikan, dampak psikososial, dan implikasi terhadap layanan BK. Tahap berikutnya adalah sintesis dan interpretasi, di mana peneliti menghubungkan teori, data empiris, dan kondisi pendidikan di Indonesia. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan yang menjelaskan bagaimana ketimpangan akses pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik dan bagaimana layanan bimbingan konseling dapat memberikan intervensi yang tepat dan berkeadilan (Sugiyono 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap 7 jurnal yang relevan, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar siswa. Tabel berikut merangkum 7 jurnal yang dianalisis dalam studi pustaka ini:

No	Peneliti/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Teori yang Digunakan
1	(Sihotang & Sihombing, 2022)	Kesenjangan besar di daerah terpencil disebabkan infrastruktur dan tenaga pendidik minim.	Fokus regional dan sosial ekonomi lebih sempit dibandingkan penelitian ini yang membahas lima aspek utama kesenjangan pendidikan.	Teori ketimpangan sosial dan pembangunan regional
2	(Wahyuni & Abdullah, 2021)	Budaya lokal, kebijakan daerah, dan minimnya peran masyarakat memperparah kesenjangan.	Tidak membahas secara menyeluruh aspek kebijakan dan solusi nasional seperti SEBsP.	Teori partisipasi sosial dan kultural

3	(Astuti & Nugroho, 2021)	Pembelajaran daring sulit diakses siswa ekonomi bawah selama pandemi.	Penelitian ini lebih luas, tidak hanya masa pandemi, tapi juga kondisi struktural dan kebijakan.	Teori digital divide (kesenjangan digital)
4	(Dewi & Rahman, 2020)	Pendidikan rendah berkorelasi dengan penghasilan dan partisipasi sosial rendah.	Penelitian ini menambah analisis terhadap kebijakan pemerataan dan strategi pemerintah.	Teori mobilitas sosial dan struktur kelas
5	(Mulyadi, 2021)	Ketimpangan kualitas guru dan fasilitas menghambat pemerataan pendidikan dasar.	Penelitian ini lebih menyeluruh hingga mencakup kurikulum, sistem kolaboratif dan pembiayaan lintas sektor.	Teori pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan
6	(Rahayu & Jannah, 2023)	Efektivitas program pemerataan rendah akibat lemahnya sinergi pusat-daerah dan monitoring.	Penelitian ini memperluas cakupan ke arah kolaborasi multi-pihak dan program jangka panjang (SEBSP).	Teori evaluasi kebijakan publik
7	(Haris & Fadli, 2022)	Diskriminasi terhadap perempuan dan disabilitas dalam akses pendidikan.	Penelitian ini memasukkan aspek gender, namun penelitian utama lebih holistik.	Teori gender dan inklusi pendidikan

Kesenjangan pendidikan adalah persoalan serius yang menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesenjangan ini merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam hal kualitas, kesempatan, dan hasil belajar antarindividu atau kelompok sosial. Di Indonesia, kesenjangan pendidikan terlihat jelas dari ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok kaya dan miskin, serta antara sekolah negeri dan swasta. Penelitian (Sihotang dan Sihombing, 2022) menyatakan bahwa anak-anak di wilayah terpencil cenderung mengalami kesenjangan pendidikan yang lebih besar karena keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Misalnya, siswa di Papua dan NTT memiliki indeks pembangunan pendidikan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta atau Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum inklusif dan merata secara nasional. Lebih jauh, hasil studi dari (Wahyuni dan Abdullah, 2021) mengidentifikasi bahwa faktor budaya, kebijakan lokal yang belum mendukung, serta minimnya peran serta masyarakat menjadi faktor penguat terjadinya kesenjangan. Kesenjangan ini bukan hanya berdampak pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk ketidakadilan sosial sejak usia dini. Akses pendidikan mencakup berbagai aspek seperti ketersediaan sekolah, keterjangkauan biaya, transportasi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta akses terhadap teknologi dan sumber belajar.

Akses yang tidak merata menyebabkan banyak anak di Indonesia mengalami keterbatasan dalam meraih hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan. Adapun faktor penyebab kesenjangan akses pendidikan :

1. Faktor Geografis

Daerah terpencil dan perbatasan cenderung memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Keluarga dari golongan ekonomi rendah memiliki keterbatasan dalam membiayai pendidikan, mulai dari akses internet, transportasi, hingga perlengkapan sekolah.

3. Infrastruktur dan Teknologi

Ketimpangan akses terhadap sarana prasarana seperti listrik, jaringan internet, dan perangkat teknologi menjadi kendala utama dalam mengikuti pembelajaran, terutama saat masa pandemi.

Dalam konteks digitalisasi pembelajaran, akses pendidikan juga ditentukan oleh kemampuan keluarga menyediakan perangkat dan koneksi internet yang memadai. (Astuti dan Nugroho, 2021) mengungkapkan bahwa selama pandemi, siswa dari kelompok ekonomi bawah kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki gawai atau kuota internet yang cukup. Hal ini berkontribusi pada kesenjangan pembelajaran (learning loss), khususnya pada siswa sekolah dasar. Kesenjangan akses juga berkaitan erat dengan gender. Dalam beberapa masyarakat adat dan konservatif, anak perempuan lebih sedikit mendapatkan kesempatan sekolah karena dianggap tidak seprioritas anak laki-laki. Menurut (Haris dan Fadli, 2022), masih terdapat praktik diskriminatif terhadap anak perempuan dan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan di beberapa daerah di Indonesia.

Kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan menimbulkan berbagai dampak sosial yang luas dan kompleks. Salah satu dampak utama adalah munculnya kemiskinan struktural, di mana individu yang tidak mendapat pendidikan yang layak cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan dan tidak memiliki mobilitas sosial yang memadai. Adapun berbagai dampaknya sebagai berikut :

1. Kemiskinan Sruktural

Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan pendidikan layak cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

2. Ketimpangan Ekonomi

Akses pendidikan yang tidak merata menyebabkan distribusi sumber daya manusia berkualitas juga tidak merata, sehingga memperkuat kesenjangan ekonomi antarwilayah.

3. Marginalisasi sosial

Kelompok masyarakat tertentu, terutama di daerah tertinggal dan minoritas, mengalami keterpinggiran dalam pembangunan sosial karena keterbatasan pendidikan.

(Dewi dan Rahman, 2020) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berkorelasi dengan rendahnya penghasilan dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Selain itu, ketimpangan pendidikan juga memperbesar jurang ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, memperburuk ketimpangan wilayah, dan mengurangi kohesi sosial antarwarga negara. Kesenjangan pendidikan juga berdampak pada munculnya perasaan ketidakadilan dan frustrasi sosial, khususnya di kalangan pemuda. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu stabilitas nasional jika tidak segera ditangani secara serius.

Pemerataan pendidikan tidak hanya berarti membangun sekolah di setiap kecamatan, tetapi juga mencakup pemerataan kualitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik, dan kesetaraan dalam hasil belajar. Dalam hal ini, keadilan menjadi elemen kunci, yakni memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah atau kelompok masyarakat. (Mulyadi (2021) mencatat bahwa ketimpangan dalam hal kualitas guru, sarana prasarana, serta beban belajar yang tidak proporsional menjadi penghalang dalam pemerataan pendidikan. Sekolah-sekolah unggulan cenderung hanya berada di kota besar, sedangkan sekolah-sekolah di desa dan daerah terpencil kerap kali kekurangan guru tetap, fasilitas laboratorium, dan akses terhadap pelatihan guru. Untuk menanggulangi ketimpangan ini, pemerintah telah menjalankan beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), zonasi pendidikan, serta pelatihan digital bagi guru. Namun, menurut penelitian oleh Rahayu dan Jannah (2023), efektivitas kebijakan tersebut masih rendah karena lemahnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum adanya sistem monitoring yang kuat.

Adapun Upaya lainnya difokuskan melalui program Sustainable Education Best Program (SEBsP) yang dirancang secara komprehensif untuk menjawab tantangan kesenjangan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Program ini mencakup beberapa aspek penting seperti pengembangan kurikulum yang relevan dengan potensi lokal daerah 3T, model pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan (Project-Based Learning, School-Based Enterprise, dan School-to-Work System), serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui program sarjana pendidikan lima tahun yang mencakup pengabdian di daerah 3T.

Selain itu, program ini juga menekankan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti kelas alam dan workshop, serta pemberdayaan sumber daya manusia lokal melalui beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pemanfaatan potensi wisata alam daerah. Pendanaan SEBsP tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga mengoptimalkan kontribusi dari perusahaan melalui CSR, zakat, dan partisipasi orang tua asuh. Implementasi program dilakukan secara bertahap hingga tahun 2035 dengan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan tinggi, perusahaan BUMN/swasta, serta masyarakat lokal. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem pendidikan yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan secara signifikan di wilayah 3T

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan dan mendorong pemerataan. Kebijakan seperti Merdeka Belajar, Digitalisasi Sekolah, dan Pengangkatan Guru PPPK merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjawab persoalan pendidikan secara sistemik. Namun, studi oleh (Fitriyani dan Harahap, 2023) menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan ini telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya masih terkendala oleh birokrasi, minimnya data real-time, serta rendahnya kapasitas manajemen pendidikan di tingkat daerah. Beberapa daerah juga belum mampu menyerap anggaran pendidikan secara maksimal. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan pendidikan di masa depan harus lebih berbasis data, kolaboratif, dan mengutamakan partisipasi masyarakat serta fleksibilitas lokal dalam pelaksanaan program. Pemerintah juga perlu memperkuat monitoring dan evaluasi agar kebijakan tidak hanya berhenti di tingkat perencanaan. Adapun upaya strategis pemerataan pendidikan antara lain :

1. Digitalisasi Pembelajaran

Pemanfaatan teknologi untuk menyediakan akses pembelajaran daring bagi siswa di daerah terpencil menjadi solusi jangka pendek dan menengah.

2. Penguatan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif dalam membangun infrastruktur pendidikan serta mendukung program-program literasi dan pelatihan guru.

3. Kebijakan Afirmatif

Program beasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS), dan intervensi khusus bagi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dinilai sebagai langkah konkret untuk menekan ketimpangan.

Kesenjangan pendidikan yang terjadi menunjukkan adanya peran dominan kelas menengah atas dalam sistem pendidikan, sesuai dengan teori reproduksi sosial Bourdieu, di mana anak-anak dari keluarga miskin sulit mengejar pendidikan berkualitas karena keterbatasan modal ekonomi dan budaya. Keterbatasan akses internet selama pandemi COVID-19 mempertegas hasil (Astuti & Nugroho, 2021), bahwa siswa miskin kehilangan hak belajar. Hal ini memperdalam learning loss dan memperluas jurang sosial. Teori kesenjangan struktural mendukung bahwa kondisi sosial-ekonomi ikut menentukan kualitas pendidikan yang diterima. Program afirmatif seperti KIP, ADEM, dan zonasi sesuai dengan pendekatan keadilan sosial, namun sebagaimana dikritisi (Fitriyani & Harahap, 2023), lemahnya implementasi menyebabkan program tidak berjalan maksimal. Karena itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti model SEBsP penting dikembangkan.

Peran Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi terhadap Perkembangan Peserta Didik

Hasil kajian terhadap tujuh jurnal menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan akademik, psikologis, sosial, dan emosional peserta didik. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, infrastruktur pendidikan, akses teknologi, serta hambatan budaya dan gender. Dalam konteks pendidikan, temuan ini menguatkan bahwa ketimpangan bukan hanya persoalan struktural, tetapi juga masalah psikososial yang membutuhkan peran strategis dari layanan bimbingan konseling (BK) di sekolah.

Kajian literatur menunjukkan bahwa latar belakang ekonomi keluarga menentukan kualitas pengalaman belajar anak. (Sihotang & Sihombing, 2022) menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik di daerah terpencil menghambat perkembangan akademik secara serius. Di sisi lain, (Wahyuni & Abdullah, 2021) menunjukkan bahwa dimensi sosial budaya, seperti nilai tradisional dan minimnya partisipasi masyarakat, berkontribusi pada rendahnya motivasi belajar dan dukungan psikologis anak. Dalam perspektif bimbingan konseling, kondisi ini merupakan faktor risiko psikososial yang dapat memicu rendahnya motivasi belajar, keputusan akademik, perasaan inferior dibanding teman sebaya, kesulitan penyesuaian diri, kecenderungan putus sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi konseling berbasis penguatan resiliensi, motivasi intrinsik, dan dukungan emosional.

Hasil studi (Astuti & Nugroho, 2021) memperlihatkan bahwa pembelajaran daring selama pandemi memperjelas kesenjangan digital. Siswa dari keluarga kurang mampu kehilangan hak belajar karena keterbatasan perangkat, jaringan internet, maupun dukungan orang tua. Hal ini berkontribusi terhadap learning loss, terutama pada jenjang SD. Kondisi ini berdampak langsung pada perkembangan kognitif, kepercayaan diri akademik, kemampuan regulasi diri, pengelolaan stres. Dalam layanan BK, konselor perlu menjalankan layanan responsif seperti konseling individual, layanan krisis, serta coaching belajar untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan akademik sekaligus menjaga kesehatan mentalnya.

Penelitian (Haris & Fadli, 2022) menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan juga dialami oleh anak perempuan dan penyandang disabilitas akibat budaya patriarki dan minimnya layanan inklusif. Dalam konteks ini, BK berperan penting melalui advokasi siswa rentan, peningkatan kesadaran sekolah dan orang tua terhadap hak pendidikan, layanan konseling yang sensitif gender dan inklusi, penguatan kepercayaan diri dan penerimaan diri siswa. Konselor sekolah bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh dukungan psikososial dan akses pendidikan.

Temuan (Dewi & Rahman, 2020) dan (Wahyuni & Abdullah, 2021) menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan bukan hanya berdampak akademik, tetapi juga menyebabkan rendahnya partisipasi sosial, keterpinggiran struktur sosial, terbatasnya pengembangan nilai diri, rendahnya kemampuan interpersonal. Situasi ini dapat memicu marginalisasi psikologis, sebuah kondisi di mana anak merasa tidak memiliki peluang untuk berkembang. Dalam perspektif BK, konselor harus mengembangkan program layanan dasar untuk meningkatkan keterampilan sosial, memperkuat dukungan kelompok sebaya melalui layanan bimbingan kelompok, mengembangkan program life-skills bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

(Mulyadi (2021) menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas sekolah menyebabkan perbedaan besar dalam kualitas pembelajaran. Guru di sekolah terpencil kerap tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dan bekerja dalam kondisi yang sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada peserta didik dalam bentuk rendahnya kualitas pembelajaran, lemahnya motivasi dan arah karier, kurangnya kesempatan mengembangkan potensi diri. Konselor berperan membantu siswa menemukan arah belajar, melakukan asesmen kebutuhan, serta memfasilitasi perencanaan karier bagi siswa agar tidak terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga.

Penelitian (Rahayu & Jannah, 2023) dan (Fitriyani & Harahap, 2023) menegaskan bahwa banyak program pemerintah seperti KIP, ADEM, dan digitalisasi sekolah terkendala pada lemahnya monitoring, kurangnya sinergi pusat-daerah, rendahnya literasi kebijakan di tingkat sekolah. Dalam konteks BK, konselor dapat menjadi mediator kebijakan, yaitu memastikan bahwa siswa yang layak menerima program bantuan benar-benar mendapatkan akses tersebut. Konselor juga dapat memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pemanfaatan program afirmatif dan mendorong kolaborasi sekolah-masyarakat.

SIMPULAN

Hasil kajian terhadap tujuh jurnal menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan akademik, psikologis, sosial, dan emosional peserta didik. Faktor geografis, keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya infrastruktur pendidikan, kesenjangan teknologi, serta hambatan budaya dan gender menjadi penyebab utama ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia. Kesenjangan ini tidak hanya memunculkan learning loss, rendahnya motivasi belajar, dan keterbatasan partisipasi sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan marginalisasi psikologis dan memutus peluang mobilitas sosial anak. Dalam konteks ini, layanan bimbingan konseling memiliki peran strategis sebagai fasilitator, advokat, dan mediator kebijakan. Konselor berperan memperkuat resiliensi, motivasi, keterampilan sosial, serta memberikan pendampingan emosional bagi siswa dari keluarga rentan. Selain itu, BK perlu mengembangkan program responsif, preventif, dan pengembangan diri yang berorientasi pada keadilan pendidikan. Dengan intervensi yang tepat, BK dapat membantu memutus dampak ketimpangan sosial ekonomi dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Bambang. 2024. *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*.
- Astuti, W. D., & Nugroho, A. S. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19: Kajian di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 4(2), 55–67.
- Dewi, L. R., & Rahman, A. (2020). Kesenjangan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 5(1), 12–24
- Fitriyani, R., & Harahap, M. F. (2023). Analisis Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan di Era Digital. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 6(2), 88–99.
- Chandra, Mutiara Putri, Muhammad Alridho Lubis, Program Studi, and Universitas Jambi. 2023. “Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa Dengan Penerapan Layanan.” 6(2):109–19.
- Haris, F., & Fadli, R. (2022). Gender dan Akses Pendidikan Dasar di Indonesia: Studi pada Komunitas Adat. *Jurnal Gender dan Pendidikan*, 6(1), 77–91.
- Mulyadi, M. (2021). Pemerataan Pendidikan Dasar di Indonesia: Evaluasi Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(3), 310–325.
- Marleni, Lusi. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Siswa.” *Journal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika* 1(1):149–59.
- Rahayu, S., & Jannah, M. (2023). Analisis Efektivitas Program Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(1), 45–58
- Sihotang, M., & Sihombing, H. (2022). Kesenjangan Pendidikan di Indonesia: Kajian Regional dan Sosial Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(1), 22–34.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunawan, Mr, Halen Dwistia, Kusnarto Kurniawan, Sri Hartati, and Afriyadi Sofyan. 2017. “Classroom Engagement and Mathematics Achievement of Senior and Junior High School Students.” 2(2). doi: 10.2991/ictte-17.2017.26.
- Waruwu, Marinu. 2024. “Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9(2):1220–30. doi: 10.29303/jipp.v9i2.2141.
- Wahyuni, R., & Abdullah, H. (2021). Ketimpangan Pendidikan dan Tantangannya di Indonesia Timur. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(2), 141–153.